



## **Anti Hoaks Pemilu 2024: Pelatihan Periksa Fakta oleh Pemilih Pemula**

**Amelia Dwi Handayani<sup>1</sup>, Nurlaili Khikmawati<sup>2</sup>, Aghnia Dian Lestari<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon, Indonesia

### **A B S T R A C T**

New voters from Gen Z do not have experience in voicing their aspirations in the General Election (Pemilu). Meanwhile, their political participation is necessary, considering that they are one of the two majority groups of voters in the 2024 elections. On the other hand, these first-time voters from Gen Z have good digital skills, even though they are not yet accompanied by a high level of civility. They are also a group that is vulnerable to being exposed to hoaxes and does not yet have the knowledge and skills to use several digital methods and tools to check the validity of the information they receive. The digital literacy program in this service activity was carried out to increase awareness of the political participation of novice voters (Gen Z) in the 2024 Election and strengthen the digital literacy of novice voters (Gen Z) to carry out fact checking using fact checking tools or applications from Mafindo and Google. The service program is carried out in the form of training and adopts material from the Tular Reasoning Program initiated by Mafindo. The training applies a debunking approach that focuses on fact-finding to counter false information. In its implementation, the training activity involved Class XII students from SMAN 4 and SMAN 7 Cirebon City aged between 17-19 years as participants. They are among Gen Z who are exercising their right to vote for the first time in the 2024 elections. By implementing a debunking approach, they are trained to be critical of the information they receive, so that they do not easily believe or carelessly re-distribute information whose truth is not certain. They are also encouraged to participate in the 2024 elections and are equipped with the knowledge and skills to check the validity of information using fact-checking tools or applications.

**Keywords:** Hoax, Digital Literacy, Fact Checking

Received:	Revised:	Accepted:	Available online:
11.10.2023	23.09.2024	14.10.2024	27.12.2024

### **Suggested citation:**

Handayani, Amelia Dwi., Khikmawati, Nurlaili., & Lestari, Aghnia Dia . (2023). Literasi Digital: Anti Hoaks Pemilu 2024 melalui Periksa Fakta oleh Pemilih Pemula. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 89-104. DOI: 10.24235/dimasejati.62.17344

Open Access | URL: <https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/dimasejati/article/view/17344>

<sup>1</sup> Corresponding Author: Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon; Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi, Kota Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. 45132; Email: ameliadwihandayani@syekhnurjati.ac.id

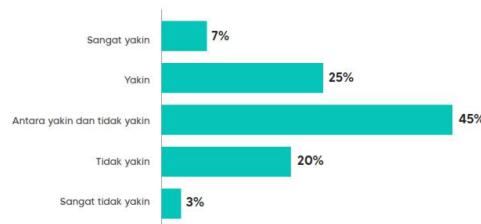
## PENDAHULUAN

Pesta demokrasi kembali diselenggarakan di Indonesia di tahun 2024 ini. Sebagai perhelatan lima tahun sekali, seluruh komponen masyarakat diharapkan ikut serta menyalurkan hak suaranya dan mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) yang demokratis. Pemilu demokratis dimaksudkan untuk mendapatkan pemimpin yang memperoleh legitimasi politik dari rakyat dengan menganut nilai dan prinsip bebas, terbuka, jujur, adil, kompetitif serta menganut azas langsung, umum, bebas dan rahasia (DKPP, 2018). Adapun Pemilu 2024 ini meliputi Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, dan legislatif di tanggal 14 Februari 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 27 November 2024.

Terkait penyelenggaraan Pemilu, sudah banyak negara yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk membantu lembaga penyelenggara Pemilu menghasilkan pemilu yang berkualitas (Mahpudin, 2019). Pada aspek teknis, TIK berkontribusi membuat penyampaian pesan menjadi lebih mudah, lebih luas, dan nyaris tidak mengenal batas teritorial. Namun pada aspek lain, kemudahan ini berdampak pada reliabilitas dari pesan-pesan yang beredar. Sifat *anonimitas* komunikator yang muncul dari pola ini menjadikan komunikasi rentan dengan manipulasi dan konflik kepentingan. Hoaks adalah salah satu produk yang lahir dari hal tersebut (Paskarina et al., 2018).

Konstestasi Pemilu 2024 masih berpotensi diwarnai dengan adanya kampanye hitam dan penyebaran hoaks (UPG, 2023). Kedua hal ini saling relevan karena cara paling efektif untuk menyuguhkan kampanye hitam atau kampanye negatif adalah dengan menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau hoaks (FHUI, 2014). Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengidentifikasi sudah ada 101 isu hoaks yang berbedar mengenai Pemilu 2024. Dengan rincian 10 hoaks sepanjang 2022 dan 91 hoaks sejak Januari 2023 sampai 26 Oktober 2023 (Kemenkominfo, 2023). Artinya Pemilu yang semakin dekat akan diiringi dengan penyebaran hoaks yang semakin masif. Terbukti dari data di atas yang menunjukkan terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat hoaks di 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Salah satu data yang digunakan untuk penanganan hoaks adalah Indeks Literasi Digital di Indonesia. Hasil pengukuran indeks di tahun 2022 menunjukkan status Literasi Digital di Indonesia mengalami kenaikan menjadi 3,54 dibandingkan tahun 2021 (Kemenkominfo, 2022). Meski demikian sebagian besar responden dari survei ini masih ragu terhadap kemampuan mereka mengidentifikasi hoaks. Hanya 32% yang merasa yakin atau pun sangat yakin memiliki kemampuan ini. Namun demikian, mayoritas menganggap bahwa keberadaan berita atau informasi yang salah/tidak sesuai fakta/hoaks merupakan permasalahan serius.

**Gambar 1. Kemampuan Identifikasi Berita Hoaks**

Sumber: Kemenkominfo, 2022

Dalam upaya pencegahan penyebaran hoaks, 80,4% responden akan melakukan pencarian kebenaran informasi yang diterima. Apabila ternyata yang diterima adalah hoaks maka 15,3% responden akan menegur dan 8,3% akan melaporkan pada platform media tersebut. Di sisi lain, walaupun responden merasa penting untuk dapat mencari kebenaran informasi yang diterima, namun belum menjadi kebiasaan. Hanya 48% responden yang akan mengecek pada tiap gambar, video, berita, situs dan *post* di sosial media yang mereka terima.

**Gambar 2. Pengecekan Informasi yang Diterima**

Sumber: Kemenkominfo, 2022

Penyebaran hoaks dan disinformasi terkait pemilu paling banyak ditemukan di platform *Facebook* (Kemenkominfo, 2023). Beberapa contoh hoaks berkaitan dengan Pemilu yang beredar seperti "*Disinformasi Prabowo Gagal Mencalonkan Diri sebagai Presiden Setelah MK Kabulkan Batas Usia*" dan "*Disinformasi Komisi Pemilihan Umum Menolak Pendaftaran Ganjar Pranowo menjadi Capres karena Ingin Menjegal Anies Baswedan*". Dikatakan Menteri Kominfo, isu hoaks tidak hanya menyasar para Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) tapi juga reputasi KPU dan penyelenggara pemilu untuk menimbulkan *distrust* terhadap Pemilu 2024.

Sementara itu, data rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) menunjukkan Gen Z dan milenial menjadi kelompok mayoritas dari total 204.807.222 pemilih. Sebanyak 66.822.389 atau 33,60% pemilih dari generasi milenial dan 46.800.161 pemilih atau 22,85% dari Gen Z (Muhamad, 2023). Jika diakumulasikan, total pemilih dari dua kelompok ini sebanyak 113 juta pemilih. Angka ini yang membuat kedua generasi akan mendominasi pemilih Pemilu 2024, yakni sebanyak 56,45% dari total keseluruhan pemilih.

Sebutan Gen Z merujuk pada orang yang lahir mulai 1995 hingga 2000-an. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan generasi ini mendominasi populasi dengan jumlah sekitar 74,93 juta jiwa, atau 27,94% dari total penduduk di Indonesia (Rainer, 2023). Sepertu data digital, Statista mencatat lebih dari 45% *internet users* berasal dari kalangan usia ini. Sementara survei Kominfo dan Katadata Insight Center (KIC) tahun 2021 di 34 provinsi, menemukan 60% Gen Z (13-24 tahun) memiliki tingkat digital cukup namun sayangnya belum memiliki kesadaran pentingnya berdemokrasi dan menjadi netizen yang bijak (Japelidi, 2022). Microsoft melalui *Digital Civility Index* (DCI) melakukan survei terkait *Safety and Interaction Online* tahun 2021. Hasinya cukup mengejutkan banyak pihak karena Indonesia menduduki rangking 29 dari 32 negara dengan nilai DCI 76. Rangking ini menunjukkan tingkat keberadaban (*civility*) netizen Indonesia yang sangat rendah (Queency & Dawitri, 2022). Dengan kata lain *internet user* dari kalangan Gen Z yang jumlahnya 45% ini memiliki konsep *civility* rendah. Gen Z terjebak dalam euforia dan dunia tanpa batas di internet, menyebabkan aktivitas yang kebablasan dan tidak demokratik (Japelidi, 2022).

Gambaran ini menjadi tantangan bagi Gen Z utamanya dalam menghadapi Pemilu 2024. Pada pemilu nanti, sebagian besar dari generasi ini adalah *first time voters* atau pemilih pemula. Sebagai satu dari dua kelompok pemilih mayoritas di Pemilu 2024, kalangan ini sudah memiliki kekuatan dan pengaruh besar terhadap hasil pemilu. Untuk itu Gen Z harus dipersiapkan dan dipaparkan sedini mungkin dengan konsep *democratic and political resilient* dan *digital citizenship*. Harapannya mereka sebagai pemilih pemula dapat dengan sadar dan bertanggung jawab mendukung iklim demokrasi dan politik yang kondusif serta tidak rentan terpengaruh informasi yang keliru (Japelidi, 2022). Upaya ini diaplikasikan sebagai program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang tujuannya sebagai berikut 1) Meningkatkan kesadaran partisipasi politik pemilih pemula (Gen Z) di Pemilu 2024 dan 2) Memperkuat literasi digital pemilih pemula (Gen Z) untuk melakukan periksa fakta menggunakan beberapa metode dan alat bantu.

## BAHAN DAN METODE

### **Waktu dan Tempat Pengabdian**

Kegiatan PKM dilakukan di SMAN 4 dan SMAN 7 Kota Cirebon, yang beralamat di Jalan Perjuangan Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Jawa Barat. Sasaran kegiatan PKM ini adalah pelajar Kelas XII atau berusia 17-19 tahun dari kedua sekolah. Mereka merupakan kalangan Gen Z yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2024.

### **Metode dan Rancangan Pengabdian**

Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM adalah *service learning*. *Service learning* memberikan penekanan pada aspek praktis (Afandi et al., 2022) sehingga subjek dampingan tidak hanya memahami materi namun juga mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan membagikannya kepada masyarakat. Penerapan metode ini dilakukan melalui tiga tahap utama yaitu investigasi, persiapan, dan pelaksanaan yang dilakukan sejak September sampai Desember tahun 2023. Berdasarkan tahapan tersebut, maka dilakukan langkah-langkah kegiatan yang dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 1.** Langkah-langkah Kegiatan PKM

No	Kegiatan	Bulan ke-			
		9	10	11	12
<b>A Pra Kegiatan</b>					
1	Investigasi permasalahan dan penyempurnaan proposal				
2	Menjaring kemitraan dengan Bawaslu Kota Cirebon dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo)				
3	Komunikasi dan koordinasi dengan SMAN 4 dan SMAN 7 Kota Cirebon				
<b>B Pelaksanaan</b>					
1	Kajian materi pelatihan (sumber materi dari Mafindo)				
2	Pembentukan dan pembekalan Fasilitator				
3	Sosialisasi kegiatan pelatihan				
4	Pelaksanaan pelatihan				
5	Evaluasi kegiatan PKM				
<b>C Penyusunan Laporan dan Diseminasi PKM</b>					
1	Penyusunan <i>output</i> dan <i>outcome</i> PKM				
2	Penyerahan <i>output</i> PKM dan Seminar Hasil Akhir PKM				

Adapun pada praktiknya, kegiatan pelatihan dalam PKM ini menggunakan pendekatan *debunking*. Pendekatan *debunking* memiliki fokus pengungkapan fakta dari suatu informasi yang diterima para pemilih selama tahap Pemilu 2024. Tujuannya agar mereka memiliki alternatif untuk menentukan keabsahan informasi yang diterima. Dari hasil riset ditemukan bahwa pendekatan ini akan berdampak efektif dalam melawan hoaks ketika diimbangi dengan tersedianya pusat-pusat informasi yang berperan untuk memverifikasi keabsahan informasi yang beredar (Paskarina et al., 2018). Pusat-pusat informasi bisa berupa saluran komunikasi dalam bentuk situs, aplikasi, atau perangkat lain. Pada PKM ini, pusat-pusat informasi spesifik berupa *tools* atau aplikasi periksa fakta yang dikelola oleh beberapa lembaga seperti Mafindo dan Google. Sayangnya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui alat bantu periksa fakta yang dikelola lembaga tersebut. Padahal keberadaannya akan membantu ketika ingin melakukan verifikasi informasi yang diterima, apakah fakta atau hoaks. Untuk itu pelatihan periksa fakta menjadi langkah penting ketika menerapkan pendekatan *debunking* di kegiatan PKM ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

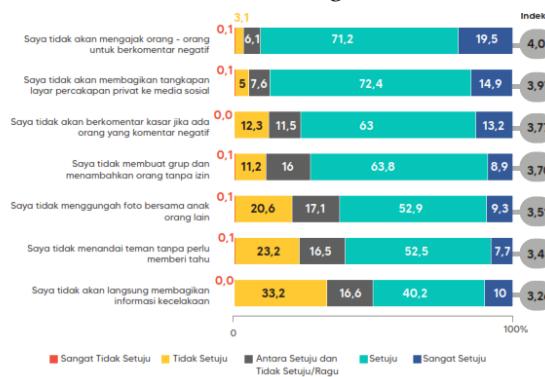
### Identifikasi potensi dan kebutuhan kegiatan pelatihan periksa fakta oleh pemilih pemula

Paparan sebelumnya menjelaskan kondisi dari sasaran kegiatan PKM dan tantangan yang menjadi persoalan. Di antara kondisi Gen Z dan tantangan hoaks Pemilu 2024 ini, terdapat potensi untuk mengembangkan program literasi digital anti hoaks melalui kegiatan pelatihan periksa fakta oleh pemilih pemula. Potensi ini diantaranya adanya kenaikan Indeks Literasi Digital di Indonesia, gerakan sosial oleh aktivis anti-hoaks, dan pengalaman IAIN sebagai mitra program Tular Nalar.

**Potensi adanya kenaikan Indeks Literasi Digital di Indonesia.** Indeks Literasi Digital mengacu pada kerangka kerja dalam Road Map Literasi Digital 2020-2024 (Kemenkominfo, 2022). Ada empat pilar yang menjadi bagian dari kerangka kerja pengembangan kurikulum literasi digital, yaitu *Digital Skill*, *Digital Ethics*, *Digital Safety*, dan *Digital Culture*. Potensi program literasi digital anti hoaks dalam konteks PkM ini berasal dari kenaikan indeks pada pilar *Digital Skill* dan *Digital Ethics*.

*Digital skill* merupakan salah satu pilar pada Indeks Literasi Digital yang yang meningkat. Salah satu indikator yang paling tinggi dalam pilar ini adalah kemampuan untuk mengunduh file atau aplikasi. Disusul kemampuan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan internet. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, indikator keterbiasaan mencari tahu apakah informasi yang ditemukan di website benar atau salah naik dari 3,05 (tahun 2021) menjadi 3,25 (pada 2022).

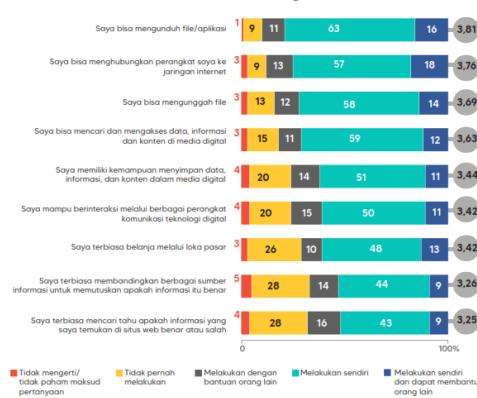
**Gambar 3.** Pilar Digital Skill



Sumber: Kemenkominfo, 2022

Digital ethics menjadi pilar yang skornya naik signifikan dan paling besar di antara pilar lain. Kontribusi kenaikan pilar ini berasal dari beberapa indikator yang memiliki nilai tinggi, seperti mengajak orang untuk tidak berkomentar negatif (indeks 4,07) dan tidak membagikan tangkapan layar di media sosial (indeks 3,97).

**Gambar 4.** Pilar Digital Ethics



Sumber: Kemenkominfo, 2022

Tren positif dari kedua indeks ini membuka peluang program pemberdayaan anak muda konteksnya adalah literasi digital. Hal ini diimplementasikan melalui pelatihan penggunaan tools atau aplikasi periksa fakta mandiri dan dengan pendekatan debunking.

**Potensi adanya gerakan sosial oleh aktivis anti-hoaks.** Pada perjalannya, beberapa aktivis anti hoaks terkoordinir dengan membuat group/fanpage di Facebook, seperti Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (55734 anggota), Indonesia Hoax Buster (4555 anggota), Indonesian Hoaxes Community (52091 anggota), dan Grup Sekoci (6706 anggota). Kemudian terbentuk perkumpulan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) sebagai wadah organisasi para aktivis anti hoaks ini sekaligus payung hukum untuk keempat grup Facebook tersebut.

Mafindo adalah organisasi masyarakat sipil anti-hoaks yang telah memelopori banyak inisiatif untuk melawan infodemic atau wabah hoaks. Visi dan misi organisasi ini adalah menciptakan masyarakat yang tercerahkan dan kebal terhadap berbagai tipuan dan ujaran kebencian. Organisasi ini adalah inisiator program literasi digital yang diberi nama Tular Nalar. Program ini sudah masuk tahun ketiga dan ditujukan untuk mendorong inovasi dan kolaborasi luas untuk meningkatkan literasi digital dan pemikiran kritis warga digital di Indonesia. Untuk menangkal hoaks pemilu, saat ini Tular Nalar memfokuskan materi kurikulum untuk membekali para pemilih pemula dan lansia untuk tujuan memberikan kemampuan melakukan pengindraan hoaks agar dapat melakukan pencegahan sebelum dampak hoaks terjadi sekaligus memposisikan diri sebagai agen perubahan untuk warga digital di Indonesia.

**Potensi pengalaman IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai mitra Program Tular Nalar 2.0.** Program Tular Nalar 2.0 terdiri dari Sekolah Kebangsaan dan Akademi Digital Lansia. Kedua program ini pernah dilaksanakan di Cirebon yang melibatkan Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) sebagai mitra pelaksana. Berkat jaringan yang dimiliki Tim Pengabdi, pelaksanaan Tular Nalar 2.0 oleh UMC juga bekerjasama dengan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Peran Pengabdi adalah sebagai tim panitia dan Fasilitator di Sekolah Kebangsaan dan Akademi Digital Lansia. Dengan pengalaman dan jejaring yang sudah ada memudahkan Pengabdi untuk menerapkan kegiatan PKM ini dengan tujuan yang relevan.

#### **Kegiatan pelatihan periksa fakta oleh pemilih pemula Kota Cirebon**

Penjelasan sebelumnya mengerucut pada solusi program literasi digital dengan pendekatan *debunking* untuk mengatasi sebaran hoaks Pemilu 2024. Program ini diaplikasikan melalui kegiatan pelatihan periksa fakta kepada pelajar Kelas XII SMAN 4 dan SMAN 7 Cirebon. Perjalanan program ini dilalui dengan tiga tahap utama yakni investigasi, persiapan, dan pelaksanaan.

**Tahap investigasi** dilakukan dengan menganalisis kondisi pelajar Kelas XII sebagai kalangan Gen Z dan permasalahan yang meliputinya, khususnya konteks hoaks Pemilu 2024. Langkah ini juga meliputi kegiatan observasi, penetapan lokus, dan pengumpulan data sekunder.

**Tahap persiapan** diantaranya dengan menjaring kemitraan dengan beberapa pihak, kajian materi pelatihan, pembentukan dan pembekalan fasilitator, dan persiapan lain yang sifatnya teknis.

Langkah menjaring kemitraan dilakukan dengan membuka komunikasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cirebon, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon. Mafindo dan SMAN yang menjadi lokasi pelatihan. Upaya ini dilakukan agar kegiatan PKM memiliki peluang untuk memberikan *impact* yang lebih signifikan. Mengingat, pihak-pihak ini terlibat dalam kepentingan yang sama dengan tujuan PKM.

Pertama, koordinasi dengan Ketua Bawaslu dan staf DKIS Kota Cirebon. Hasil koordinasi mendapat respons positif di mana kedua lembaga sepakat bahwa tujuan PKM penting untuk dipenuhi, hanya saja belum ditemukan model kemitraan yang tepat.

**Gambar 5.** Menjaring Kemitraan dengan Bawaslu dan DKIS Kota Cirebon



Kedua, koordinasi dengan Program Manager dan Koordinator Tim Outsearch Tular Nalar. Komunikasi dengan Ibu Santi Indra Astuti selaku Program Manager dilakukan secara daring sedangkan dengan Ibu Rita Gani selaku Kordinator Tim Outsearch dilakukan luring di Universitas Islam Bandung. Hasilnya, Pengabdi mendapatkan izin untuk menggunakan materi Tular Nalar sebagai rujukan utama di kegiatan PKM dengan pendekatan *debunking*. Ketiga, koordinasi dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Kesiswaan SMAN 4 dan SMAN 7 Kota Cirebon. Hasil dari pertemuan ini kedua sekolah siap menerima kegiatan PKM dan memastikan sebagian dari pelajar Kelas XII adalah pemilih pemula di Pemilu 2024. Kondisi ini sesuai profil target kegiatan.

Selain menjaring kemitraan, langkah lain di tahap ini adalah membentuk tim Fasilitator. Fasilitator berasal dari mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGJ. Peran dari Fasilitator sangat penting untuk menunjang keberhasilan pelatihan dengan pendekatan *debunking* yang diterapkan di PKM ini. Pada aplikasinya, pelatihan menggunakan model *micro teaching* di mana dibagi menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok berisi maksimal 10 pelajar yang didampingi 1 Fasilitator. Fasilitator ini yang akan mendampingi proses diskusi, penggunaan alat peraga untuk gim, praktik dan memonitoring ketercapaian tujuan tiap segmen pelatihan. Pelibatan mahasiswa di kegiatan akan memberikan nilai tambah, di mana PKM bukan saja bentuk kolaborasi antar Perguruan Tinggi tapi juga antar dosen dan mahasiswa.

Setelah membentuk Fasilitator, langkah selanjutnya adalah kajian materi. Materi Tular Nalar yang menjadi rujukan utama kemudian dikaji oleh Tim Pengabdi dan Fasilitator. Hasil dari pengkajian materi adalah beberapa penyesuaian dan modifikasi. Diantaranya menambah informasi tahapan Pemilu 2024, celah informasi dan gim

distorsi informasi. Setelah materi disempurnakan dilakukan sesi pembekalan kepada Fasilitator dan simulasi. Tujuan pembekalan adalah agar para Fasilitator lebih percaya diri serta mendalami materi, mampu mempengaruhi dan memotivasi peserta sehingga tujuan program dapat tercapai dengan lebih baik. Langkah lain berkaitan dengan persiapan teknis seperti menyediakan ATK, cetak materi dan alat peraga, cetak seminar kit, dan hal-hal lain yang dibutuhkan selama proses PKM berlangsung.

**Tahap pelaksanaan.** Pelatihan dilakukan di dua lokasi yakni SMAN 4 dan SMAN 7 Kota Cirebon. Pesertanya adalah siswa-siswi Kelas XII berjumlah 100 orang. Secara umum yang menjadi capaian pelatihan adalah sebagai berikut:

- Memahami makna pemilu sebagai wadah Demokrasi
- Mengetahui peran penting pemilih pemula
- Mengidentifikasi tantangan pemilih pemula dalam Pemilu 2024: Tsunami informasi, banjir hoaks, politik identitas, *hate speech*
- Memahami berpikir kritis sebagai bekal bagi pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam Pemilu
- Mampu periksa fakta
- Berkomitmen untuk menjadi pemilih cerdas dalam pemilihan umum

Untuk memudahkan memeroleh capaian ini, sesi pelatihan dibagi menjadi empat segmen, menggunakan model *micro teaching* dan pendekatan *debunking*.

**Gambar 6.** Pelaksanaan PKM di SMAN 4 dan SMAN 7 Kota Cirebon



Pelatihan terbagi menjadi empat segmen yang dibawakan dengan alur sebagai berikut: penjelasan, gim, diksusi, key takeaways dan transisi ke segemen berikutnya. Empat segmen ini antara lain Partisipasi Saya, Menjadi Pemilih Kritis, Yuk Periksa Fakta, dan Refleksi. Penjelasan dan key takeaways disampaikan Fasilitator Utama dalam hal ini dosen, sedangkan diskusi, gim, dan praktik dilakukan di kelompok masing-masing oleh Fasilitator yang mendampingi.

**Tabel 2.** Segmen, Materi, dan Gim Pelatihan

Tema Segmen	Materi dan Diskusi	Gim
Segmen ke-1: Partisipasi Saya, Buat Saya	Materi: Prinsip demokrasi, pentingnya aspirasi masyarakat untuk membuat kebijakan yang tepat, fungsi pengawasan terhadap kinerja pejabat, peran pemilu sebagai wadah demokrasi, tahapan pemilu dan jabatan politik negara yang akan dipilih di Pemilu 2024.	Gim: Tabel partisipasi publik  <i>Key Takeaways:</i> "Ingin ya... pemilu itu dari kita, untuk kita, oleh kita semua. Berpartisipasi dalam Pemilu itu PENTING"

Tema Segmen	Materi dan Diskusi	Gim
	<p>Diskusi dengan beberapa pertanyaan penting:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurut kamu apakah warga negara kita sudah berpartisipasi sebagai warga negara? Mengapa?</li> <li>• Terkait pemilu, sejauh mana warga negara kita sudah berpartisipasi? Dsb</li> </ul>	
<b>Segmen ke-2:</b> Menjadi pemilih kritis	<p><b>Materi:</b></p> <p>Peran penting pemilih pemula, adanya informasi yang termanipulasi atau hoaks dan berkembang selama pemilu, penyebab hoaks tersebar, dampak pengacauan informasi, dan cara untuk cek DPT masing-masing secara online.</p> <p>Diskusi dengan beberapa pertanyaan penting:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemimpin yang ideal itu yang bagaimana?</li> <li>• Apa risikonya memilih pemimpin yang keliru?</li> <li>• Pemilu sebagai sarana untuk memilih pemimpin dan perwakilan rakyat, termasuk dari kalangan muda.</li> <li>• Memangnya suara remaja di dengar?</li> </ul>	<p><b>Gim:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kartu memilih pemimpin yang ideal</li> <li>• Memeragakan ulang video pantomim (distorsi informasi)</li> </ul> <p><b>Praktek:</b> Cek DPT online</p> <p><i>Key Takeaways:</i> "Pemilu saatnya memilih pemimpin dan wakil rakyat. Mereka akan membawa aspirasi kita kelak. Bukan tak mungkin, pemilu juga bisa memunculkan tokoh-tokoh muda. Jangan sampai salah pilih!"</p>
<b>Segmen ke-3:</b> Yuk, periksa fakta	<p><b>Materi:</b></p> <p>Memperkenalkan dan menunjukkan cara menggunakan beberapa <i>tools</i> untuk cek fakta mandiri</p> <p>Diskusi dengan beberapa pertanyaan penting:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan bersama ciri-ciri hoaks</li> <li>• Mengutarkan pendapat mereka tentang cara mencari hoaks di Kalimasada, Aplikasi Turn Back Hoax, dan Anti-Hoax Search Engine</li> </ul>	<p><b>Praktek:</b></p> <p>Memeriksa fakta secara mandiri dari contoh berita/informasi yang diberikan, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chatbot Kalimasada</li> <li>• Aplikasi Turn Back Hoax</li> <li>• Anti-Hoax Search Engine</li> </ul> <p><i>Key Takeaways:</i> "Informasi adalah kunci demokrasi. Tsunami informasi adalah tantangan bagi demokrasi dan pemilih pemula. Berpikir kritis adalah kunci bagi pemilih pemula, agar bisa menunaikan hak pilihnya dengan tepat. Wujud berpikir kritis adalah melakukan periksa fakta setiap saat pada informasi yang beredar."</p>

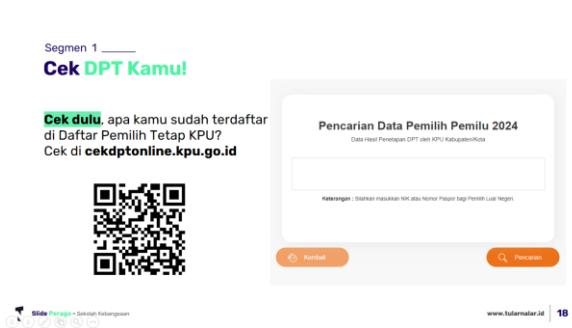
Tema Segmen	Materi dan Diskusi	Gim
<b>Segemen ke-4:</b> Refleksi: Aku siap menjadi pemilih cerdas!	Menuliskan refleksi dari materi yang sudah dibahas dan diperaktekan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Catatan refleksi ditulis di lembar Post It.</li> <li>• Menempelkan tulisan mereka pada medium yang sudah disediakan.</li> </ul>

Sumber: Program Tular Nalar (tabel diolah penulis), 2023

**Segmen 1:** Partisipasi Saya. Fasilitator utama memberikan materi terkait prinsip demokrasi, pentingnya aspirasi masyarakat untuk membuat kebijakan yang tepat, fungsi pengawasan terhadap kinerja pejabat, peran pemilu sebagai wadah demokrasi, tahapan pemilu dan jabatan politik negara yang akan dipilih di Pemilu 2024. Kemudian dilakukan sesi diskusi di kelompok masing-masing yang didampingi oleh fasilitator kelompok. Fasilitator menanyakan pertanyaan seperti 1) Menurut kamu apakah warga negara kita sudah berpartisipasi sebagai warga negara? Mengapa? 2) Terkait pemilu, sejauh mana warga negara kita sudah berpartisipasi? Pertanyaan diajukan untuk memantik proses diskusi dan memberikan ruang peserta untuk mengutarakan pendapat masing-masing. Setelah itu dipaparkan *key takeaways* dari materi dan diskusi segmen ini dan transisi ke segemen kedua.

**Segemen 2:** Menjadi Pemilih Kritis. Fasilitator utama memberikan materi peran penting pemilih pemula, adanya informasi yang termanipulasi atau hoaks dan berkembang selama pemilu, penyebab hoaks tersebar, dampak pengacauan informasi, dan cara untuk cek status DPT masing-masing secara online. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi, praktek, dan gim di kelompok masing-masing. Praktek di segmen ini adalah mengecek DPT masing-masing melalui situs [www.cekdpthonline.kpu.go.id](http://www.cekdpthonline.kpu.go.id).

**Gambar 7.** Praktek Cek Status DPT oleh Peserta



Berdasarkan catatan fasilitator, mayoritas status peserta sudah terdaftar sebagai calon pemilih di Pemilu 2024 dan beberapa belum bisa cek mandiri karena tidak hapal NIK. Nomor NIK diperlukan sebagai data yang diinput ketika cek DPT online. Temuan lain dari praktek ini adalah ada beberapa yang statusnya belum tercatat sebagai pemilih dan ada yang sudah tercatat tapi nama kurang sesuai dengan data KTP. Setelah praktek, peserta memberikan tanggapan bahwa cek online mudah dilakukan dan oleh karena itu akan mencoba cek status anggota keluarganya.

Setelah cek DPT online, peserta diskusi terkait profil pemimpin ideal. Diskusi diawali dengan gim kartu memilih pemimpin ideal. Prosedurnya tiap peserta

mendapat satu gambar dengan profil berbeda lalu diberi waktu untuk analisa dan memikirkan apakah profil di kartu menunjukkan sebagai pemimpin ideal menurut versinya. Setelah analisa peserta akan menjelaskan hasilnya kepada anggota kelompok lain. Dalam hal ini tidak ada pilihan yang benar atau salah. Kebebasan terhadap pilihan masing-masing dan menghargai pilihan yang berbeda adalah refleksi dari prinsip demokrasi yang dipelajari dari segmen ini. Proses diskusi juga dipancing dengan pertanyaan yang diajukan fasilitator kelompok seperti apa risikonya memilih pemimpin yang keliru? dan lain sebagainya untuk menstimulus mereka berpikir kritis.

**Gambar 8.** Contoh Alat Peraga Gim Kartu Memilih Pemimpin Ideal



Materi dari fasilitator dilanjutkan dengan pembahasan celah informasi atau hoaks yang berkembang selama tahapan Pemilu 2024. Untuk pemahaman yang lebih konkret sekaligus membangun suasana lain dilakukan gim bernama distorsi informasi, yakni memeragakan gerakan pantomim di kelompok masing-masing. Prosedurnya tiap anggota membentuk 1 barisan yang menghadap ke satu sisi.

**Gambar 9.** Diskusi di Kelompok yang Didampingi Fasilitator

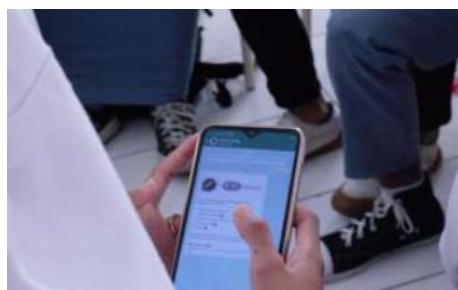


Gim dilakukan dengan kelompok masing-masing, dimana pada prakteknya adalah membentuk barisan. Peserta dibaris terakhir menjadi pemeraga pertama. Peserta ini yang memiliki kesempatan untuk menonton video pantomin produksi Tim Tular Nalar 2.0. Kemudian akan memeragakan gerakan yang sudah ditonton ke peserta di depannya. Proses ini berlaku sampai peserta di baris terdepan. Kunci dari gim ini adalah menganalogikan informasi yang diterima tiap individu bisa berbeda atau mengalami distorsi. Peserta yang mempraktekkan punya gambaran yang lebih konkret sehingga sadar bahwa informasi memang bisa mengalami distorsi dan akan berdampak negatif apabila distorsi merubah konteks, makna atau tujuan informasi yang sebenarnya.

**Segmen 3: Yuk, periksa fakta.** Pertama, Fasilitator memberikan satu contoh hoaks Pemilu 2024 yang sudah tersebar. Kemudian peserta diberi kesempatan untuk melakukan cek fakta dengan pendekatan *debunking*. Kedua, Fasilitator menjelaskan

bahwa pengguna internet bisa melakukan periksa fakta mandiri dibantu beberapa tools atau aplikasi. Tools ini diantaranya: Chatbot Kalimasada (0859-21-600-500), Aplikasi Hoax Buster Tools, Situs <http://cekfakta.com>, Situs <http://turnbackhoax.id>, dan Google Reverse Image Tool.

**Gambar 10.** Salah satu peserta mempraktekkan penggunaan Chatbot Kalimasada untuk Periksa Fakta



Fasilitator memberikan penekanan bahwa pemilih cerdas memeriksa setiap informasi yang datang dan menelusuri calon wakil rakyat yang akan membawa aspirasi mereka. Kemudian dilanjutkan sesi praktik melakukan periksa fakta secara mandiri dengan beberapa tools di atas. Prosedurnya fasilitator terlebih dahulu menjelaskan penggunaan tools periksa fakta, lalu membagikan kepada peserta lembar kertas berisi contoh kasus informasi yang beredar di Pemilu 2019. Selanjutnya mendampingi peserta untuk mempraktekkan melalui gawai masing-masing sesuai contoh kasus yang diperoleh dan mendiskusikan hasilnya. Setelah itu, fasilitator meminta pendapat masing-masing terkait penggunaan tools dan aplikasi ini. Semua sepakat bahwa penggunaan tools dan aplikasi efektif untuk memeroleh kebenaran dari informasi/berita dan sangat mudah untuk digunakan, selain itu cukup informatif karena dilengkapi dengan penjelasan fakta sebenarnya jika informasi itu hoaks dan referensi sumber pendukung untuk mendalami kebenarannya. Sesi praktik ini dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut.

**Tabel 3.** Praktek Periksa Fakta Mandiri melalui Tools/Aplikasi Cek Fakta

Berita	Tools/Aplikasi Cek Fakta	Hasil Cek Fakta dan Rujukan
<b>Contoh kasus ke-1:</b>  Sebuah unggahan yang beredar di sebuah situs memberikan informasi tentang 'Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Pedro Coelho' pada Minggu (21/4) yang memberikan ucapan selamat bagi salah satu paslon dalam Pilpres 2019 ditambahkan dengan kata-kata "ucapan selamat yang hangat", melalui juru bicaranya. Informasi itu seakan-akan merupakan berita	Chatbot Kalimasada	<b>Status:</b> <i>False Context</i>  <b>Fakta:</b> Kantor Berita ANTARA melalui situs resminya ( <a href="http://antaranews.com">antaranews.com</a> ) menyatakan bahwa ANTARA tidak pernah membuat berita dengan judul "Sekjen PBB Ucapkan Selamat pada Prabowo Atas terpilihnya Menjadi Presiden RI". Dari catatan berita yang ditelusuri di sistem milik ANTARA, tidak ada berita dengan isi dan judul tersebut. Selain itu Pedro Coelho bukanlah Sekretaris Jenderal PBB. Saat ini Sekretaris Jenderal PBB dijabat oleh

Berita	Tools/Aplikasi Cek Fakta	Hasil Cek Fakta dan Rujukan
yang dibuat oleh Kantor Berita ANTARA yang mengutip berita dari Kantor Berita Xinhua yang memberitakan tersebut dari New York.		<p>Antonio Guterres yang diangkat sejak 1 Januari 2017. Dia menggantikan kepemimpinan Ban Ki-moon dari tanggal 1 Januari 2017 untuk masa jabatan lima tahun.</p> <p>Dan juga, pemilu dan pilpres 2019 hingga saat ini masih dalam tahap penghitungan suara manual yang dilakukan secara berjenjang dari TPS hingga ke tingkat KPU Pusat.</p>
		<p><b>Rujukan:</b>  <a href="https://nasional.kompas.com/read/2019/04/17/14014881/ini-alur-penghitungan-suara-dari-tps-hingga-ke-tingkat-nasional">https://nasional.kompas.com/read/2019/04/17/14014881/ini-alur-penghitungan-suara-dari-tps-hingga-ke-tingkat-nasional</a></p>
<b>Contoh kasus ke-2:</b>	<b>ASE</b> <b>Anti-hoax</b> <b>Search Engine</b> <b>By Google</b>	<p><b>Status:</b>  <b>Benar</b></p>
<p>“Beberapa hari belakangan ini marak di media sosial soal kabar pasien pengidap gangguan jiwa boleh ikut memilih dalam Pemilu 2019. Kabar tersebut bermula dari berita yang dimuat oleh media daring Poskotanews.com pada tanggal 12 November yang diberi judul “<b>Pasien Gangguan Jiwa Mulai Didata untuk Pemilu</b>”</p>	<p><b>Penjelasan:</b>  Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menjelaskan mekanisme pemungutan suara bagi pemilik suara di Pemilu 2019, yang memiliki gangguan kejiwaan. Arief Budiman mengatakan, pasien gangguan jiwa yang memiliki hak pilih, diwajibkan menyertakan surat keterangan dokter saat akan memberikan suaranya. Mekanisme untuk pemilih dengan kondisi seperti itu sangat beragam, tergantung gangguan jiwa yang dialami dan kondisi masing-masing lokasi.</p>	<p><b>Referensi :</b>  <a href="http://wartakota.tribunnews.com/.../pemilih-yang-punya-ganggu...">http://wartakota.tribunnews.com/.../pemilih-yang-punya-ganggu...</a>  <a href="https://www.viva.co.id/.../1096268-pengidap-gangguan-jiwa-bis...">https://www.viva.co.id/.../1096268-pengidap-gangguan-jiwa-bis...</a>  <a href="http://poskotanews.com/.../menyoal-hak-politik-pasien-ganggu...">http://poskotanews.com/.../menyoal-hak-politik-pasien-ganggu...</a></p>
<b>Contoh kasus ke- 3:</b>	<b>Aplikasi</b> <b>Hoax Buster</b> <b>Tools</b>	<p><b>Status:</b>  <b>DISINFORMASI / Konten yang Salah</b></p>
Video dengan narasi:		<p><b>Penjelasan:</b></p>

Berita	Tools/Aplikasi Cek Fakta	Hasil Cek Fakta dan Rujukan
“Pecah!! Madura kacau, ribuan warga Sampang madura kepung KPU tuntut kecurangan massa bentrok dgn polisi, KPU berhadapan dgn rakyat”		<p>Terkait peristiwa yang terekam dalam video tersebut, Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Frans Barung Mengera menegaskan, bahwa kejadian itu bukan Pemilu 17 April 2019, tapi Pilkada serentak 2018 di Sampang.</p> <p><b>Referensi:</b>  <a href="https://www.merdeka.com/peristiwa/polda-jatim-sebut-video-kerusuhan-pemilu-di-sampang-itu-pilkada-2018.html">https://www.merdeka.com/peristiwa/polda-jatim-sebut-video-kerusuhan-pemilu-di-sampang-itu-pilkada-2018.html</a>  <a href="https://www.viva.co.id/pemilu/berita-pemilu/1142104-hoax-beredar-video-ricuh-ribuan-warga-kepung-kantor-kpu-sampang">https://www.viva.co.id/pemilu/berita-pemilu/1142104-hoax-beredar-video-ricuh-ribuan-warga-kepung-kantor-kpu-sampang</a></p>

Sumber: Penulis, 2023

**Segmen 4: Refleksi Siap menjadi pemilih cerdas!** Di segmen ini peserta menuliskan refleksi dari materi yang sudah dibahas dan dipraktekkan. Catatan refleksi ditulis di lembar Post It dan ditempel pada medium yang sudah disediakan. Beberapa dari peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil refleksinya. Segmen ini juga menjadi penutup dari kegiatan pelatihan di PKM ini.

## SIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan PKM dengan menggunakan pendekatan debunking dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan digital peserta dalam menanggapi informasi hoaks. Pendekatan ini relatif sederhana dan bisa diaplikasikan oleh berbagai kalangan. Terdapat 3 (tiga) langkah dalam memeriksa informasi dengan pendekatan ini, fokusnya pada pencarian fakta untuk melawan informasi palsu. Dengan menggunakan pendekatan ini, para pemilih pemula sebagai peserta dilatih untuk bersikap kritis terhadap infomasi yang diterimanya, sehingga tidak mudah percaya dan atau ceroboh menyebarkan kembali informasi tersebut yang belum pasti kebenarannya. Untuk menunjang keterampilan *debunk* dari para peserta, mereka juga dibekali pengetahuan dan keterampilan dalam periksa fakta menggunakan *tools* atau aplikasi periksa fakta. Tools ini diantaranya: Chatbot Kalimasada (0859-21-600-500), Aplikasi Hoax Buster Tools, Situs <http://cekfakta.com>, Situs <http://turnbackhoax.id>, dan Google Reverse Image Tool.

## Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang telah mendanai pelaksanaan kegiatan PKM melalui skema pendanaan bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Tahun 2023. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam (FDKI) IAIN Syekh

Nurjati Cirebon, Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ), Mafindo, Kepala Sekolah SMAN 4 dan SMAN 7 Kota Cirebon beserta jajarannya, dan siswa-siswi Kelas XII SMAN 4 dan SMAN 7 Kota Cirebon atas partisipasinya dalam kegiatan pelatihan periksa fakta dengan beberapa metode dan alat bantu cek fakta digital.

## REFERENSI

- DKPP. (2018). *Ini Ciri Pemilu yang Demokratis*. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI. <https://dkpp.go.id/ini-ciri-pemilu-yang-demokratis/>
- FHUI. (2014). *Permasalahan Black Campaign dalam Pemilihan Umum*. Humas Fakultas Hukum Universitas Indonesia. <https://law.ui.ac.id/permashalan-black-campaign-dalam-pemilihan-umum-wawancara-dengan-wirdyaningsih-s-h-m-h/>
- Japelidi. (2022). *Term of Reference Pelatihan Tular Nalar Akademi Digital Lansia dan Sekolah Kebangsaan*.
- Kemenkominfo. (2022). Status Literasi Digital di Indonesia 2022. *Kemenkominfo, November*, 205–207. <https://www.c2es.org/content/renewable-energy/>
- Kemenkominfo. (2023). *Menkominfo: Isu Hoaks Pemilu Meningkat Hampir 10 Kali Lipat*. Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. [https://www.kominfo.go.id/content/detail/52570/siaran-pers-no-422hmkominfo102023-tentang-menkominfo-isu-hoaks-pemilu-meningkat-hampir-10-kali-lipat/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/52570/siaran-pers-no-422hmkominfo102023-tentang-menkominfo-isu-hoaks-pemilu-meningkat-hampir-10-kali-lipat/0/siaran_pers)
- Mahpuдин, M. (2019). Pemanfaatan Teknologi Pemilu Di Tengah Era Post Truth: Antara Efisiensi dan Kepercayaan. *Jurnal PolGov*, 1(2), 157. <https://doi.org/10.22146/polgov.v1i2.55886>
- Muhammad, N. (2023). *KPU: Pemilih Pemilu 2024 Didominasi oleh Kelompok Gen Z dan Milenial*. Katadata Media Network. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/kpu-pemilih-pemilu-2024-didominasi-oleh-kelompok-gen-z-dan-milenial>
- Paskarina, C., Hermawati, R., & Nuraeni. (2018). Edukasi Anti-Hoax dalam Pemilu Melalui Metode Debunking. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Padjajaran*, 2(5). <https://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/view/19887/9653>
- Queency, M. A., & Dawitri, N. (2022). *Indonesia's Low Digital Index-Two Sides of Indonesia* (Issue March). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17889.58721>
- Rainer, P. (2023). *Sensus BPS: Saat Ini Indonesia Didominasi Oleh Gen Z*. <https://data.goodstats.id/statistic/pierrerainer/sensus-bps-saat-ini-indonesia-didominasi-oleh-gen-z-n9kqv>
- UPG. (2023). *Pemilu 2024, Jadilah Pemilih Cerdas*. Universitas Pendidikan Ganesha. <https://undiksha.ac.id/pemilu-2024/>

### Copyright and License



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

© 2024 Amelia Dwi Handayani, Nurlaili Khikmawati, Aghnia Dian Lestari

Published by LP2M of IAIN Syekh Nurjati Cirebon